

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka Sunarti (2014: 91) berpendapat

Pemberdayaan keluarga merupakan upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk membuat keluarga lebih berdaya dan berkualitas melalui kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan keluarga diharapkan dapat melahirkan keluarga yang mandiri, mampu mengelola masalah dan mencari solusi pemecahan dari suatu masalah. Keluarga yang berdaya memiliki kreativitas dalam meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya.

Hakikat pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di daerah tersebut sehingga kehidupan mereka lebih berkualitas. Maka pembangunan daerah berarti juga sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pembangunan manusia melalui pendayagunaan dan pengoptimalan sumber daya yang dimiliki. Namun demikian, aspek terpenting dalam pembangunan manusia seutuhnya harus berawal dari diri manusia itu sendiri. Sebagai subjek, manusia menjadi pelaku atas pembangunan, dan sebagai objek manusia adalah yang harus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan itu akan terus berlanjut di masyarakat sehingga akan menghasilkan keadaan masyarakat yang adil dan makmur.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting sebagai aset bangsa. Keluarga bukan hanya dianggap sebagai sasaran pembangunan, tetapi merupakan pelaku (subjek) pembangunan. Untuk itu perlu diatur tentang pembangunan keluarga sejahtera, terutama dalam mempersiapkan sumber daya anggota keluarga yang potensial. Dalam bidang ketahanan keluarga, diupayakan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan menumbuhkembangkan anak, disamping menurunnya ketidak harmonisan dan tindak kekerasan dalam keluarga.

Pembangunan berwawasan keluarga merupakan pembangunan keluarga yang dilakukan secara seksama mempertimbangkan dimensi keluarga sebagai sasaran dan pelaku. Dengan demikian, pengembangan sumber daya keluarga adalah rangkaian upaya pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah swasta dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu terwujudnya keluarga yang maju, mandiri, sejahtera, hidup selaras, serasi serta seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya pembangunan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pemberdayaan keluarga sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat sangat penting. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk dan keluarga terbanyak dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Kondisi dan kualitas keluarga di Jawa Barat akan berkontribusi secara nyata terhadap kondisi keluarga di Indonesia. Sementara kondisi yang ada menunjukkan masih besarnya keluarga terkategori

pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dan berbagai masalah keluarga di Jawa Barat (perceraian, *trafficking*, kekerasan kepada perempuan dan anak).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sangat tepat ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 mengenai pembangunan Ketahanan Keluarga yang salah satunya mengamanatkan program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di tingkat desa atau kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan ketahanan keluarga yang tertuang pada pasal 31 ayat 1. Program MOTEKAR ini direncanakan akan berlangsung selama 5 tahun (2014-2018) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan.

Keluarga sebagai struktur terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting bagi lahirnya masyarakat berkualitas. Dari keluargalah lahirnya kebiasaan-kebiasaan dan perilaku positif dari anggotanya. Keluarga dapat dikatakan sebagai “terminal” untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi bagi anggotanya yang telah melakukan perjalanan dan bertemu dengan berbagai karakter manusia yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku.

Kondisi kerapuhan dan perceraian keluarga di Indonesia khususnya di Jawa Barat cenderung selalu meningkat. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2017 terjadi perceraian sebanyak 63.881 kasus. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Poppy Shopia Bakur, ada beragam faktor yang menyebabkan

tingginya angka perceraian, beberapa diantaranya dikarenakan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan anak dibawah umur dan faktor ekonomi. Sekitar 33 ribu kasus disebabkan oleh faktor ekonomi, maka solusinya adalah perempuan harus lebih berdaya dalam ekonomi sehingga dapat ikut meningkatkan taraf ekonomi keluarga. (Tribun Jabar, 2018)

Begitu pula terjadi peningkatan angka *human trafficking*, baik perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah-tangga, kekerasan terhadap anak, tingkat pengangguran yang cenderung naik, jumlah *drop out* anak sekolah yang cukup tinggi, pekerja seks dikalangan remaja, juga tingginya kriminalitas dikalangan remaja dan anak merupakan tanda dari ketidakmampuan dalam membangun ketahanan keluarga. Bahkan menurut penelitian, bahwa salah satu penyebab tingginya angka kematian balita di Jawa Barat disebabkan karena lemahnya ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 tahun 1992 merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung ketahanan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. (BKKBN, 1992:2)

Ketahanan keluarga yang lemah selalu berkaitan dengan kurang optimalnya dari pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, sehingga melahirkan keluarga bermasalah, diantaranya : *Pertama*, keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari 6 indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan. *Kedua*,

keluarga rentan yaitu keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau nonfisiknya.

Ketahanan keluarga sejatinya adalah merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk membangun ketahanan keluarga.

Program MOTEKAR ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomer 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Mengacu pada Perda tersebut, bahwa pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya pembangunan keluarga yang komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang, guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pembangunan ketahanan keluarga ini sangat efektif untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.

Keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga (keagamaan, sosial, budaya, cinta-kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan). Keberadaan keluarga yang berkualitas ini sangat bergantung pada keberdayaan unsur-unsur anggota keluarga sebagai suatu sistem

organisasi terkecil dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik dan benar mengacu pada nilai-nilai agama dan budayanya.

Dalam keluarga sebagai suatu organisasi terkecil, maka terdapat seorang pemimpin yang biasanya diletakan pada seorang suami sebagai kepala keluarga, dan seorang istri sebagai manajer rumah-tangga serta anak-anak yang sejak dilahirkan tumbuh berkembang yang harus mendapatkan pendidikan dan pengasuhan, baik dalam pembentukan karakter, keagamaan dan sosial budaya. Dalam pengasuhan inilah terjadi proses pemberdayaan dalam internal anggota keluarga yang dilandari nilai kasih-sayang, sehingga terjadi transformasi nilai pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadikan keluarga yang berkualitas.

Orientasi proses pemberdayaan yang terjadi dalam internal anggota keluarga bertujuan untuk meningkatkan keluarga yang berkualitas, tetapi biasanya membutuhkan stimulasi dan transformasi nilai keberdayaan dari pihak luar yang memiliki keberdayaan diri. Difasilitasi dari pihak luar dalam bentuk stimulasi dan transformasi nilai keberdayaan ini berfungsi sebagai motivator, agar keluarga tersebut memiliki keberdayaan diri melaksanakan fungsi-fungsi keluarga sebagai sistem organisasi keluarga dalam mewujudkan keluarga bahagia lahir dan batin.

Keberadaan motivator dalam keluarga-keluarga yang mengalami kekurangberdayaan tersebut sangatlah dibutuhkan, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) sejak tahun 2014 telah

menjalankan Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di lingkungan masyarakat Desa/ kelurahan di Jawa Barat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator ketahanan keluarga. Tugas tenaga motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) antara lain : (a) mengidentifikasi, (b) memotivasi, (c) memediasi, (d) mendidik, (e) merencanakan dan (f) mengadvokasi yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat desa/ kelurahan di Jawa Barat.

Sebagian pelaksanaan tugas motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) dalam kehidupan masyarakat desa/ kelurahan di Jawa Barat tersebut, ada yang telah dilakukan oleh berbagai aktivis dalam kelompok masyarakat di lingkungan majelis taklim, PKK, Posyandu dan berbagai jenis kelompok masyarakat lainnya termasuk aktivis individual sebagai kader pemberdayaan masyarakat (KPM) dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, tenaga MOTEKAR merupakan tenaga-tenaga aktivis pemberdayaan keluarga yang berpengalaman berasal dari daerah setempat untuk dapat melaksanakan tugas sebagai motivator ketahanan keluarga.

Program ini dimulai pada tahun 2014 dengan merekrut sekitar 1000 orang sebagai tenaga motivator ketahanan keluarga yang tersebar di 200 desa/

kelurahan di 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, terutama daerah-daerah yang memiliki tingkat ketahanan keluarga yang relatif rendah, baik rentan dari aspek fisik, ekonomi, sosio-psikologi dan sosial budayanya.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyak terjadi kasus perceraian mencapai angka sebanyak 63.881 kasus. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan anak di bawah umur dan faktor ekonomi.
2. Terjadi peningkatan angka kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) khususnya terhadap perempuan dan anak.
3. Terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak.
4. Jumlah angka pengangguran yang cenderung naik disebabkan karena masih kurangnya kemampuan keterampilan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakberdayaan dalam perekonomian keluarga.
5. Tingginya jumlah drop out anak sekolah baik karena perilaku kenakalan maupun faktor ketidakmampuan ekonomi, tingginya jumlah pekerja seks remaja dan tingginya angka kriminalitas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh motivator ketahanan keluarga ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh motivator ketahanan keluarga

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah atau variabel didalam skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Pemberdayaan Keluarga melalui Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya” (Studi tentang Pemberdayaan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat)**, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah:

1. Pemberdayaan Keluarga

Winarni (2004) dalam Suryana (2010: 18) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal “pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian”. Sedangkan menurut Mas’oed (1990), beliau berpendapat bahwa “pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat”.

Keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri) dan anak. Dari keluarga mereka mempelajari sifat-keyakinan, sifat-sifat mulia,

komunikasi dan interaksi sosial, serta keterampilan hidup. (Helmawati, 2014:42)

Pemberdayaan keluarga adalah proses pemberdayaan dalam internal anggota keluarga yang dilandasi nilai kasih-sayang, pendidikan dan pengasuhan baik pendidikan karakter, sosial maupun budayanya sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk menjadikan keluarga yang berkualitas.

Pemberdayaan ini difasilitasi dari pihak luar dalam bentuk stimulasi dan transformasi nilai keberdayaan yang berfungsi sebagai motivator, agar keluarga tersebut memiliki keberdayaan diri melaksanakan fungsi-fungsi keluarga sebagai sistem organisasi keluarga.

2. Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)

MOTEKAR adalah kependekan dari motivator ketahanan keluarga, yakni tenaga motivator ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan, kemampuan dan keterampilan serta telah melalui proses seleksi di tingkat Provinsi Jawa Barat, untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas keluarga menuju keluarga yang sejahtera.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai proses pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan oleh motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR).

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan mengenai peran motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) dalam melaksanakan pemberdayaan keluarga.
- b. Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan keluarga .
- c. Sebagai bahan masukan dalam melakukan proses pemberdayaan keluarga serta merasang penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan.
- d. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam pengembangan peran dan fungsi motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) dalam memberdayakan keluarga.